



Laporan Kinerja

DIREKTORAT PELABUHAN PERIKANAN

TAHUN **2020**

KATA PENGANTAR



Direktorat Pelabuhan Perikanan telah memanfaatkan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai tools dalam proses manajemen strategik yang diawali dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Dengan BSC, seluruh unit-unit organisasi kini memiliki kaitan yang erat baik secara vertikal maupun horizontal yang bermuara kepada satu titik pencapaian visi dan misi KKP. BSC menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu-individu yang ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Dengan mengacu pada RPJMN 2020 – 2024 dan Renja tahun 2020, Direktorat Pelabuhan Perikanan senantiasa mengupayakan seluruh rencana aksi yang ada dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien, sebagaimana mestinya dengan harapan target indikator kinerja yang terdapat pada RPJMN dan RKP dapat tercapai dengan maksimal dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi Direktorat Pelabuhan Perikanan kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan PerPres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian pada Tahun 2020 merupakan pencapaian yang dijadikan dasar (*baseline*) untuk menetapkan target pada tahun – tahun berikutnya yang kemungkinan besar akan berdampak pada revisi beberapa dokumen perencanaan di Tahun 2021.

Semoga apa yang disajikan dalam Laporan Kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan Triwulan 2 Tahun 2020 ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Direktorat Pelabuhan Perikanan. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 15 Januari 2021
Direktur Pelabuhan Perikanan,



Tita P. Kusnusa

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan penetapan awal pagu Alokasi anggaran Direktorat Pelabuhan Perikanan tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 54.007.783.000,- kemudian pada triwulan 2 mengalami pengalihan alokasi anggaran sebesar 65,88% ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Penanggulangan Covid-19 sehingga alokasi anggaran Direktorat Pelabuhan Perikanan berkurang menjadi Rp. 18.451.572.000,-. Selanjutnya pada triwulan 3 Direktorat Pelabuhan Perikanan mendapatkan tambahan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan ekonomi nasional (PEN) dampak covid-19 sebesar Rp. 12.500.000.000,- sehingga alokasi anggaran bertambah menjadi Rp.30.951.572.000,-. Namun mengingat waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan PEN yang relatif singkat serta adanya pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran covid-19 maka untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan PEN, selanjutnya pada triwulan 4 dilakukan penyesuaian terhadap pagu anggaran dengan pengalihan sebagian dana penanganan ekonomi nasional dampak Covid-19 sebesar Rp.6.680.800.000 (21,58%) ke Direktorat lain sehingga pagu anggaran satker Direktorat Pelabuhan Perikanan menjadi Rp. 24.270.772.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 18.802.047.720,- (77,47%). Capaian kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan pada Tahun 2020 sudah baik, hal ini ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU sebesar 103,28% dan Nilai capaian Kinerja IKU dan IKX sebesar 100,24% sebagaimana dashboard dibawah ini.



Hal ini didukung oleh pencapaian 8 (Delapan) indikator kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan dimana terdapat 6 (Enam) IKU yang mencapai target 100 persen yakni sebagai berikut:

1. Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan (lokasi);
2. Tingkat operasional pelabuhan perikanan (persen);
3. Tingkat Kemandirian SKPT Kab. Merauke (skala kemandirian 1-5);
4. Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan (nilai);

5. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Direktorat Pelabuhan Perikanan yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen);
6. Persentase Direktorat Pelabuhan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen).

Namun demikian, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang belum mencapai target antara lain :

1. Indeks profesionalitas ASN lingkup Dit. Pelabuhan Perikanan
2. Nilai IKPA Direktorat Pelabuhan Perikanan (nilai)

Guna meningkatkan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab RKU dan Tim Pengelola Kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan agar melakukan evaluasi pencapaian yang telah dicapai serta melakukan pemantauan serta pengawasan untuk pencapaian kinerja tahun yang akan datang. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai lingkup Direktorat Pelabuhan Perikanan diharapkan dapat mendukung kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan yang lebih baik lagi pada tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.3 TUGAS DAN FUNGSI	2
1.4 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	7
BAB 2 AKUNTABILITAS KINERJA	9
2.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	9
2.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA	10
2.2.1 Sasaran Strategis (SS-1): Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	10
2.2.2 Sasaran Strategis (SS-2): Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	13
2.2.3 Sasaran Strategis (SS-3): Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	18
2.2.4 Sasaran Strategis (SS-4): Tata Kelola Direktorat Pelabuhan Perikanan yang Baik	22
2.3 KINERJA ANGGARAN	27
BAB 3 PENUTUP	29

DAFTAR TABEL

1	Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan Tahun 2020	9
2	Capaian IKU "Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan" sampai Tahun 2020	11
3	Bentuk Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Tahun 2020	11
4	Capaian IKU "Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan" Tahun 2020	13
5	Perhitungan Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Tahun 2020	13
6	Komponen Capaian Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Tahun 2020	14
7	Komponen Capaian Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantera Tahun 2020	15
8	Komponen Capaian Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Tahun 2020	16
9	Komponen Capaian Tingkat Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan Tahun 2020	17
10	Pelabuhan Perikanan Yang diusulkan untuk penetapan kelasnya Tahun 2020	17
11	Capaian Indikator Kinerja "Indeks Profesionalitas ASN Di. Pelabuhan Perikanan" Tahun 2020	22
12	Capaian Indikator Kinerja "Indeks Profesionalitas ASN lingkup Di. Pelabuhan Perikanan" Tahun 2020	24
13	Capaian Indikator Kinerja "Persentase jumlah hasil pengawasan Direktorat Pelabuhan Perikanan yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan" Tahun 2020	25
14	Capaian Indikator Kinerja "Persentase Direktorat Pelabuhan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar" Tahun 2020	25
15	Capaian Indikator Kinerja "Nilai IKPA Direktorat Pelabuhan Perikanan" Tahun 2020	26
16	Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 Tahun 2020	27

DAFTAR GAMBAR

1	Struktur Organisasi Direktorat Pelabuhan Perikanan Tahun 2020	7
2	Perjanjian Kinerja Direktur Pelabuhan Perikanan Tahun 2020	8
3	Dashboard Aplikasi Kinerja Dit Pelabuhan Perikanan Tahun 2020	9
4	Pelabuhan Perikanan di Indonesia yang Telah Ditetapkan Keluarnya	18
5	Grafik volume dan nilai produksi di SKPT Merauke tahun 2018-2020	20
6	Grafik kunjungan kapal di SKPT Merauke tahun 2018-2020	20
7	Grafik Hasil Penilaian Tingkat Kemandirian SKPT Merauke	21

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Implementasi pengembangan infrastruktur berdasarkan bisnis proses usaha perikanan tangkap menjadi kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi; dengan mengedepankan outcome berupa efisiensi pengelolaan dan nilai tambah hasil tangkapan ikan. Sinergi pengembangan infrastruktur diarahkan bukan hanya bersifat antar sektor, melainkan juga antar wilayah, serta diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui intensifikasi teknologi informasi dengan basis data yang lebih akurat. Secara umum arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong sistem infrastruktur pelabuhan perikanan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bermutu dan berdaya saing; termasuk integrasinya dengan sektor terkait, seperti industri, jasa, dan perhubungan/transportasi.

Ketersediaan pelabuhan perikanan di sentra-sentra usaha perikanan tangkap sangat vital untuk mendukung kelancaran usaha penangkapan ikan dan usaha pendukungnya. Pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan untuk meningkatkan operasional pelabuhan perikanan sesuai peran dan fungsinya sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel serta penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang sesuai dengan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi tolok ukur penilaian kinerja suatu Instansi Pemerintah. Dalam rangka mendukung terciptanya tujuan dimaksud, maka instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus menyusun Laporan Kinerja. Dasar dari penyusunan laporan kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/Permen-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKJ) Direktorat Pelabuhan Perikanan Tahun 2020 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Pelabuhan Perikanan. Adapun tujuan penyusunan LKJ Direktorat Pelabuhan Perikanan Tahun 2020 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Pelabuhan Perikanan selama Tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan pelabuhan perikanan ke depan.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pasal 289, Direktorat Pelabuhan Perikanan berada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Adapun tugas Direktorat Pelabuhan Perikanan adalah melaksanakan penyisipan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengembangan pelabuhan perikanan, tata operasional pelabuhan perikanan, pengendalian pembangunan pelabuhan perikanan, kesyahbandaran pelabuhan perikanan, serta sistem informasi dan penguatan keterpaduan pelabuhan perikanan.

Sedangkan sesuai pasal 289, Direktorat Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi :

1. Penyisipan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis PPS, PPN, PPP, dan PPI;
2. Penyisipan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis PPS, PPN, PPP, dan PPI;
3. Penyisipan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan PPS, PPN, PPP, dan PPI;
4. Penyisipan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis PPS, PPN, PPP, dan PPI;
5. Penyisipan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis PPS, PPN, PPP, dan PPI; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Untuk melaksanakan Tugas dan fungsi tersebut Direktorat Pelabuhan Perikanan terdiri dari 4 Subdirektorat (Subdirektorat Pelabuhan Perikanan Samudera, Subdirektorat Pelabuhan Perikanan Nusantara, Subdirektorat Pelabuhan Perikanan Pantai dan Subdirektorat Pengkalan Pendaratan Ikan) dan Subbagian Tata Usaha.

1.3.1 Subdirektorat Pelabuhan Perikanan Samudera

Subdirektorat Pelabuhan Perikanan Samudera mempunyai tugas melaksanakan penyisipan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis PPS. Sedangkan fungsinya adalah:

1. penyisipan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan, penyusunan studi kelayakan, masterplan, detail desain, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/pengembangan fasilitas dan sarana, pengendalian lingkungan, pengembangan keterpaduan/konektivitas, pengelolaan direktori, tata laksana pelabuhan perikanan, cara penanganan ikan yang baik, kelembagaan dan penetapan kelas, penetapan wilayah kerja dan pengoperasian, pelaksanaan pengusahaan, penerapan pelayanan standar

internasional, kesyahbandaran, pelaksanaan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN), penerapan Port State Measures (PSM), pengelolaan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), serta penilaian kinerja dan penghitungan nilai ekonomi di PPS;

2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan, penyusunan studi kelayakan, masterplan, detail desain, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/ pengembangan fasilitas dan sarana, pengendalian lingkungan, pengembangan keterpaduan/konektivitas, pengelolaan direktori, tata laksana pelabuhan perikanan, cara penanganan ikan yang baik, kelembagaan dan penetapan kelas, penetapan wilayah kerja dan pengoperasian, pelaksanaan perusahaan, penerapan pelayanan standar internasional, kesyahbandaran, pelaksanaan SPDN, penerapan PSM, pengelolaan PIPP, serta penilaian kinerja dan penghitungan nilai ekonomi di PPS;
3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan, penyusunan studi kelayakan, masterplan, detail desain, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/ pengembangan fasilitas dan sarana, pengendalian lingkungan, pengembangan keterpaduan/ konektivitas, pengelolaan direktori, tata laksana pelabuhan perikanan, cara penanganan ikan yang baik, kelembagaan dan penetapan kelas, penetapan wilayah kerja dan pengoperasian, pelaksanaan perusahaan, penerapan pelayanan standar internasional, kesyahbandaran, pelaksanaan SPDN, penerapan PSM, pengelolaan PIPP, serta penilaian kinerja dan penghitungan nilai ekonomi di PPS;
4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan, penyusunan studi kelayakan, masterplan, detail desain, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/ pengembangan fasilitas dan sarana, pengendalian lingkungan, pengembangan keterpaduan/ konektivitas, pengelolaan direktori, tata laksana pelabuhan perikanan, cara penanganan ikan yang baik, kelembagaan dan penetapan kelas, penetapan wilayah kerja dan pengoperasian, pelaksanaan perusahaan, penerapan pelayanan standar internasional, kesyahbandaran, pelaksanaan SPDN, penerapan PSM, pengelolaan PIPP, serta penilaian kinerja dan penghitungan nilai ekonomi di PPS; dan
5. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan, penyusunan studi kelayakan, masterplan, detail desain, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/ pengembangan fasilitas dan sarana, pengendalian lingkungan, pengembangan keterpaduan/konektivitas, pengelolaan direktori, tata laksana pelabuhan perikanan, cara penanganan ikan yang baik, kelembagaan dan penetapan kelas, penetapan wilayah kerja dan pengoperasian, pelaksanaan perusahaan, penerapan pelayanan standar internasional, kesyahbandaran, pelaksanaan SPDN, penerapan PSM, pengelolaan PIPP, serta penilaian kinerja dan penghitungan nilai ekonomi di PPS.

1.3.2 Subdirektorat Pelabuhan Perikanan Nusantara

Subdirektorat Pelabuhan Perikanan Nusantara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis PPN. Sedangkan fungsinya adalah:

1. penyajian bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan, penyusunan studi kelayakan, masterplan, detail desain, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/ pengembangan fasilitas dan sarana, pengendalian lingkungan, pengembangan keterpaduan/konektivitas, pengelolaan direktori, tata laksana pelabuhan perikanan, cara penanganan ikan yang baik, kelembagaan, penetapan dan peningkatan kelas, penetapan wilayah kerja dan pengoperasian, pelaksanaan perusahaan, penerapan pelayanan standar internasional, kesyahbandaran, pelaksanaan SPDN, penerapan PSM, pengelolaan PIPP, serta penilaian kinerja dan penghitungan nilai ekonomi di PPN;
2. penyajian bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan, penyusunan studi kelayakan, masterplan, detail desain, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/ pengembangan fasilitas dan sarana, pengendalian lingkungan, pengembangan keterpaduan/konektivitas, pengelolaan direktori, tata laksana pelabuhan perikanan, cara penanganan ikan yang baik, kelembagaan, penetapan dan peningkatan kelas, penetapan wilayah kerja dan pengoperasian, pelaksanaan perusahaan, penerapan pelayanan standar internasional, kesyahbandaran, pelaksanaan SPDN, penerapan PSM, pengelolaan PIPP, serta penilaian kinerja dan penghitungan nilai ekonomi di PPN;
3. penyajian bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan, penyusunan studi kelayakan, masterplan, detail desain, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/ pengembangan fasilitas dan sarana, pengendalian lingkungan, pengembangan keterpaduan/konektivitas, pengelolaan direktori, tata laksana pelabuhan perikanan, cara penanganan ikan yang baik, kelembagaan, penetapan dan peningkatan kelas, penetapan wilayah kerja dan pengoperasian, pelaksanaan perusahaan, penerapan pelayanan standar internasional, kesyahbandaran, pelaksanaan SPDN, penerapan PSM, pengelolaan PIPP, serta penilaian kinerja dan penghitungan nilai ekonomi di PPN;
4. penyajian bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan, penyusunan studi kelayakan, masterplan, detail desain, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/ pengembangan fasilitas dan sarana, pengendalian lingkungan, pengembangan keterpaduan/konektivitas, pengelolaan direktori, tata laksana pelabuhan perikanan, cara penanganan ikan yang baik, kelembagaan, penetapan dan peningkatan kelas, penetapan wilayah kerja dan pengoperasian, pelaksanaan perusahaan, penerapan pelayanan standar internasional, kesyahbandaran, pelaksanaan SPDN, penerapan PSM, pengelolaan PIPP, serta penilaian kinerja dan penghitungan nilai ekonomi di PPN; dan
5. penyajian bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan, penyusunan studi kelayakan, masterplan, detail desain, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/ pengembangan fasilitas dan sarana, pengendalian lingkungan, pengembangan keterpaduan/konektivitas, pengelolaan direktori, tata laksana pelabuhan perikanan, cara penanganan ikan yang baik, kelembagaan, penetapan dan peningkatan kelas, penetapan wilayah kerja dan pengoperasian, pelaksanaan perusahaan, penerapan pelayanan standar internasional, kesyahbandaran, pelaksanaan SPDN, penerapan PSM, pengelolaan PIPP, serta penilaian kinerja dan penghitungan nilai ekonomi di PPN.

1.3.3 Subdirektorat Pelabuhan Perikanan Pantai

Subdirektorat Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis PPP. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan, penyusunan studi kelayakan, masterplan, detail desain, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/pengembangan fasilitas dan sarana, pengendalian lingkungan, pengembangan keterpaduan/konektivitas, pengelolaan direktori, tata laksana pelabuhan perikanan, cara penanganan ikan yang baik, kelembagaan, penetapan dan peningkatan kelas, penetapan wilayah kerja dan pengoperasian, pelaksanaan perusahaan, penerapan pelayanan standar internasional, kesyahbandaran, pelaksanaan SPON, penerapan PSM, pengelolaan PIPP, serta penilaian kinerja dan penghitungan nilai ekonomi di PPP;
2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan, penyusunan studi kelayakan, masterplan, detail desain, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/pengembangan fasilitas dan sarana, pengendalian lingkungan, pengembangan keterpaduan/konektivitas, pengelolaan direktori, tata laksana pelabuhan perikanan, cara penanganan ikan yang baik, kelembagaan, penetapan dan peningkatan kelas, penetapan wilayah kerja dan pengoperasian, pelaksanaan perusahaan, penerapan pelayanan standar internasional, kesyahbandaran, pelaksanaan SPON, penerapan PSM, pengelolaan PIPP, serta penilaian kinerja dan penghitungan nilai ekonomi di PPP;
3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan, penyusunan studi kelayakan, masterplan, detail desain, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/pengembangan fasilitas dan sarana, pengendalian lingkungan, pengembangan keterpaduan/ konektivitas, pengelolaan direktori, tata laksana pelabuhan perikanan, cara penanganan ikan yang baik, kelembagaan, penetapan dan peningkatan kelas, penetapan wilayah kerja dan pengoperasian, pelaksanaan perusahaan, penerapan pelayanan standar internasional, kesyahbandaran, pelaksanaan SPON, penerapan PSM, pengelolaan PIPP, serta penilaian kinerja dan penghitungan nilai ekonomi di PPP;
4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan, penyusunan studi kelayakan, masterplan, detail desain, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/pengembangan fasilitas dan sarana, pengendalian lingkungan, pengembangan keterpaduan/ konektivitas, pengelolaan direktori, tata laksana pelabuhan perikanan, cara penanganan ikan yang baik, kelembagaan, penetapan dan peningkatan kelas, penetapan wilayah kerja dan pengoperasian, pelaksanaan perusahaan, penerapan pelayanan standar internasional, kesyahbandaran, pelaksanaan SPON, penerapan PSM, pengelolaan PIPP, serta penilaian kinerja dan penghitungan nilai ekonomi di PPP; dan
5. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan, penyusunan studi kelayakan, masterplan, detail desain, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/pengembangan fasilitas dan sarana, pengendalian lingkungan, pengembangan keterpaduan/konektivitas, pengelolaan direktori, tata laksana pelabuhan perikanan, cara penanganan ikan yang baik, kelembagaan, penetapan dan peningkatan kelas, penetapan wilayah kerja dan pengoperasian, pelaksanaan perusahaan, penerapan pelayanan

standar internasional, kesyahbandaran, pelaksanaan SPDN, penerapan PSM, pengelolaan PIPP, serta penilaian kinerja dan perhitungan nilai ekonomi di PPI.

1.3.4 Subdirektorat Pangkalan Pendaratan Ikan

Subdirektorat Pendaratan Pangkalan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyajian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemertasaan dan analisis Pendaratan Pangkalan Ikan. Sedangkan fungsinya:

1. penyajian bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan, penyusunan studi kelayakan, masterplan, detail desain, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/ pengembangan fasilitas dan sarana, pengendalian lingkungan, pengembangan keterpaduan/ konektivitas, pengelolaan direktori, tata laksana pelabuhan perikanan, cara penanganan ikan yang baik, kelembagaan, penetapan dan peningkatan kelas, penetapan wilayah kerja dan pengoperasian, pelaksanaan perusahaan, penerapan pelayanan standar, kesyahbandaran, pelaksanaan SPDN, penerapan PSM, pengelolaan PIPP, serta penilaian kinerja dan perhitungan nilai ekonomi di PPI;
2. penyajian bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan, penyusunan studi kelayakan, masterplan, detail desain, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/ pengembangan fasilitas dan sarana, pengendalian lingkungan, pengembangan keterpaduan/ konektivitas, pengelolaan direktori, tata laksana pelabuhan perikanan, cara penanganan ikan yang baik, kelembagaan, penetapan dan peningkatan kelas, penetapan wilayah kerja dan pengoperasian, pelaksanaan perusahaan, penerapan pelayanan standar, kesyahbandaran, pelaksanaan SPDN, penerapan PSM, pengelolaan PIPP, serta penilaian kinerja dan perhitungan nilai ekonomi di PPI;
3. penyajian bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan, penyusunan studi kelayakan, masterplan, detail desain, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/ pengembangan fasilitas dan sarana, pengendalian lingkungan, pengembangan keterpaduan/ konektivitas, pengelolaan direktori, tata laksana pelabuhan perikanan, cara penanganan ikan yang baik, kelembagaan, penetapan dan peningkatan kelas, penetapan wilayah kerja dan pengoperasian, pelaksanaan perusahaan, penerapan pelayanan standar, kesyahbandaran, pelaksanaan SPDN, penerapan PSM, pengelolaan PIPP, serta penilaian kinerja dan perhitungan nilai ekonomi di PPI;
4. penyajian bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan, penyusunan studi kelayakan, masterplan, detail desain, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/ pengembangan fasilitas dan sarana, pengendalian lingkungan, pengembangan keterpaduan/ konektivitas, pengelolaan direktori, tata laksana pelabuhan perikanan, cara penanganan ikan yang baik, kelembagaan, penetapan dan peningkatan kelas, penetapan wilayah kerja dan pengoperasian, pelaksanaan perusahaan, penerapan pelayanan standar, kesyahbandaran, pelaksanaan SPDN, penerapan PSM, pengelolaan PIPP, serta penilaian kinerja dan perhitungan nilai ekonomi di PPI; dan
5. penyajian bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan, penyusunan studi kelayakan, masterplan, detail desain, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/ pengembangan fasilitas dan sarana, pengendalian lingkungan,

pengembangan keterpaduan/konektivitas, pengelolaan direktori, tata laksana pelabuhan perikanan, cara penanganan ikan yang baik, kelembagaan, penetapan dan peningkatan kelas, penetapan wilayah kerja dan pengoperasian, pelaksanaan pengusaha, penerapan pelayanan standar, kesyahbandaran, pelaksanaan SPON, penerapan PSM, pengelolaan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan PIPP, serta penilaian kinerja dan penghitungan nilai ekonomi di PPI.

1.3.5 Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawain, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dokumentasi dan kearsipan Direktorat. Dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Keuangan dan Umum.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pelabuhan Perikanan Tahun 2020

1.4 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran dipeyakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Sasaran strategis pembangunan perikanan tangkap berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut :

1. Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah "Peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan", dengan indikator kinerja: Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan.

2. Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah "Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan", dengan indikator kinerja: Tingkat operasional pelabuhan perikanan.
3. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah "Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) ", dengan indikator kinerja: Tingkat Kemandirian SKPT Kabupaten Merauke.
4. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah "Tata kelola Direktorat Pelabuhan Perikanan yang baik", dengan indikator kinerja:
 - a. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pelabuhan Perikanan;
 - b. Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan;
 - c. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Direktorat Pelabuhan Perikanan yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan;
 - d. Persentase pegawai Direktorat Pelabuhan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar;
 - e. Nilai IKPA Direktorat Pelabuhan Perikanan.

Gambar 2. Perjanjian Kinerja Direktur Pelabuhan Perikanan Tahun 2020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELABUHAN PERIKANAN

1. Sasaran Strategis

1.1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap produktivitas dan daya saing bangsa di bidang perikanan.

1.2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik perikanan.

1.3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap produktivitas dan daya saing bangsa di bidang perikanan.

1.4. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap produktivitas dan daya saing bangsa di bidang perikanan.

1.5. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap produktivitas dan daya saing bangsa di bidang perikanan.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELABUHAN PERIKANAN
INDIKATOR KINERJA PERENCANAAN

NO	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SKOR
1	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pelabuhan Perikanan	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pelabuhan Perikanan	50
2	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan	50
3	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Direktorat Pelabuhan Perikanan yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Direktorat Pelabuhan Perikanan yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	4
4	Persentase pegawai Direktorat Pelabuhan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar	Persentase pegawai Direktorat Pelabuhan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar	25
5	Nilai IKPA Direktorat Pelabuhan Perikanan	Nilai IKPA Direktorat Pelabuhan Perikanan	40
6	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pelabuhan Perikanan	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pelabuhan Perikanan	50
7	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan	50
8	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Direktorat Pelabuhan Perikanan yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Direktorat Pelabuhan Perikanan yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	4
9	Persentase pegawai Direktorat Pelabuhan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar	Persentase pegawai Direktorat Pelabuhan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar	25
10	Nilai IKPA Direktorat Pelabuhan Perikanan	Nilai IKPA Direktorat Pelabuhan Perikanan	40

Revisi: **Indikator Kinerja Tahun 2020** - **Pengukuran Pelaksanaan**
No. 16.011.01.000

Kepala Kantor Pelabuan Perikanan

Kepala Pelabuan Perikanan

Kepala Kantor Pelabuan Perikanan

Kepala Pelabuan Perikanan

BAB 2. AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan pada tahun 2020 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Pelabuhan Perikanan menitikberatkan pada 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 8 (Delapan) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Tangkap. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LK) tingkat Eselon II.



Gambar 3. Dashboard Aplikasi Enerjaku Dit Pelabuhan Perikanan Tahun 2020

Capaian kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan pada Tahun 2020 sudah baik, hal ini ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU sebesar 103,23% dan Nilai capaian Kinerja IKU dan IKK sebesar 102,34%, capaian Kinerja IKU merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Secara umum indikator kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan menunjukkan pencapaian yang semakin baik pada masing-masing sasaran strategis. Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan pada Tahun 2020 seperti pada tabel berikut.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan Tahun 2020

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	WAKTU PENGUKURAN	TARGET	CAPAIAN	%
1. Peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan	1. Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan (lokasi)	Semesteran	26	26	100,00
2. Pengelolaan pelabuhan perikanan yang bendaya saing dan berkelanjutan	2. Tingkat operasional pelabuhan perikanan (persen)	Semesteran	75,5	82,93	109,84

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	WAKTU PENGUKURAN	TARGET	CAPAIAN	%
3	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	3 Tingkat Kemandirian SKPT Kab. Merauke (level)	Tahunan	4	4	100,00
4	Tata Kelola Direktorat Pelabuhan Perikanan yang baik	4 Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pelabuhan Perikanan (indeks)	Tahunan	72	56,65	78,68
		5 Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan (nilai)	Tahunan	85	94,18	110,78
		6 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Direktorat Pelabuhan Perikanan yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	Triwulan	100	100	100,00
		7 Persentase Direktorat Pelabuhan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (persen)	Triwulan	82	100	121,95
		8 Nilai KPA Direktorat Pelabuhan Perikanan (nilai)	Triwulan	88	75,78	86,11

2.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan indikator kinerja untuk setiap Perspektif sebagai berikut :

2.2.1 Sasaran Strategis (SS-1) : Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Sasaran Strategis Peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan merupakan tujuan dari program Direktorat Pelabuhan Perikanan, sasaran ini memiliki Indikator Kinerja Utama, yaitu :

Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Indikator ini menunjukkan lokasi pembinaan pengembangan pelabuhan perikanan guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan. Adapun metode perhitungan yang dilakukan adalah dengan melakukan perhitungan jumlah lokasi capaian pengembangan di Pelabuhan Perikanan yang meliputi salah satu kegiatan berikut ini:

1. Identifikasi rencana pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan, dan/atau
2. Kegiatan penyiapan dokumen perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan, dan/atau
3. Pembahasan dan koordinasi perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan
4. Kegiatan pembinaan pengembangan pelabuhan perikanan
5. Kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan

Pengukuran indikator ini dilakukan setiap 6 (Enam) bulan atau semesteran dan target indikator ini adalah 26 Pelabuhan Perikanan pada tahun 2020.

Tabel 2. Capaian IKU "jumlah pengembangan pelabuhan perikanan" Tahun 2020

Sasaran Kegiatan 1				Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan					
IKU-1				Jumlah Pengembangan Pelabuhan Perikanan					
Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			% Realisasi 2019 - 2020	Rencana DIPT 2020	
				Target	Realisasi	% Capaian		Target 2020	% Realisasi terhadap Target Rencana
-	-	-	27	26	26	100,00	-3,70	26	100,00

Sampai dengan akhir tahun 2020 telah dilaksanakan pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di 26 lokasi. Indikator ini merupakan pengembangan dari indikator pada tahun 2019, yaitu jumlah identifikasi dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan. Capaian 26 lokasi untuk tahun 2020 telah sesuai dengan target yang ditetapkan (100%). Namun jika dibandingkan dengan tahun 2019, capaian IKU ini mengalami penurunan sebesar -3,70% . Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian target capaian akibat pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 yang terjadi diseluruh dunia.

Identifikasi fasilitas pelabuhan perikanan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 41/KEP-DIPT/2015 tentang Pedoman Umum Perhitungan Penggunaan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan untuk mengidentifikasi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Dari hasil identifikasi dan analisa data, terdapat beberapa fasilitas yang sudah sesuai dengan kelas masing-masing pelabuhan. Namun ada beberapa fasilitas yang belum sesuai dan perlu adanya pengembangan atau bahkan pembangunan baru (untuk fasilitas yang belum tersedia).

Realisasi anggaran Tahun 2020 sebesar Rp 10.624.382.192,- atau 92,89% dari pagu anggaran sebesar Rp 11.437.712.000,-. Adapun kegiatan Identifikasi dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang dilakukan oleh Direktorat Pelabuhan Perikanan sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Bentuk Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Tahun 2020

No	Lokasi	Bentuk Kegiatan (Detail kegiatan)
1	FPS Niham Zachman	a. penyusunan perencanaan sarana bantu navigasi pelayaran b. Konsolidasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran
2	FPS Bitung	a. Konsolidasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran

No	Lokasi	Bentuk Kegiatan (Detail kegiatan)
		<ul style="list-style-type: none"> b. Penyusunan perencanaan layout pengembangan fasilitas di kawasan PPS Bitung c. Penyusunan dokumen Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) RKL-RPL pengembangan PPS Bitung
3	PPS Cilacap	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembahasan dokumen perencanaan rehabilitasi gedung dan jalan komplek b. Penyusunan perencanaan pengembangan PPS Cilacap
4	PPS Belawan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan perencanaan layout pengembangan fasilitas di Kawasan PPS Belawan b. Penyusunan dokumen Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) pengembangan PPS Belawan
5	PPS Kendari	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan perencanaan layout pengembangan fasilitas di Kawasan PPS Kendari b. Penyusunan dokumen Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) pengembangan PPS Kendari
6	PPS Bungus	<ul style="list-style-type: none"> a. Rapat pembahasan identifikasi rencana kegiatan fiskal dan operasional serta penyusunan kegiatan TA 2021 b. Rapat identifikasi rencana pembangunan dermaga II Pelabuhan Penyebangan Teluk Bungus di WRONP PPS Bungus
7	PPN Kojaneman	<ul style="list-style-type: none"> a. Rapat pembinaan teknis dan supervisi ke lapangan b. Pembangunan Sirtta Kuliner Tahap 1 di kawasan wisata bahari
8	PPN Ambon	Rapat pembinaan teknis dan supervisi ke lapangan terkait identifikasi dan pengembangan pelabuhan perikanan
9	PPN Palabuhanratu	Rapat pembinaan teknis dan supervisi ke lapangan terkait identifikasi dan pengembangan pelabuhan perikanan
10	PPN Prigi	Rapat pembinaan teknis dan supervisi ke lapangan terkait identifikasi dan pengembangan pelabuhan perikanan
11	PPN Pemangrat	Rapat pembinaan teknis dan supervisi ke lapangan terkait identifikasi dan pengembangan pelabuhan perikanan
12	PPN Karangantu	Rapat pembinaan teknis dan supervisi ke lapangan terkait identifikasi dan pengembangan pelabuhan perikanan
13	PPN Brandong	Rapat pembinaan teknis
14	PPN Pekalongan	Rapat pembinaan teknis
15	PPN Kwarang	Rapat pembinaan teknis
16	PPN Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Rapat pembinaan teknis b. pembangunan kantin dan area parkir
17	PPN Sibolga	Rapat pembinaan teknis
18	PPN Sungailiat	<ul style="list-style-type: none"> a. Rapat pembinaan teknis b. Penyusunan dokumen AMDAL
19	PPN Tanjung Pandang	Rapat pembinaan teknis

No	Lokasi	Bentuk Kegiatan (Detail kegiatan)
20	PPN Tual	Rapat pembinaan teknis
21	PPN Ternate	Rapat pembinaan teknis
22	PP Menaule	a. Rapat pembinaan teknis b. Pengadaan Cold Storage c. Levelling lahan industri d. penyusunan dokumen Masterplan dan OED
23	PP Selatempa	Pembinaan teknis dan supervisi ke lapangan
24	PP Cikidang	Penyusunan Masterplan, Detail Engineering Design (DED) Jalan Kawasan dan Drainase Lingkungan PP Cikidang
25	PP Teluk Batang	
26		

2.2.2 Sasaran Strategis (SS-2): Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan

Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan merupakan indikator yang menunjukkan persentase pencapaian pembinaan operasional pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan kelasnya termasuk pelabuhan perikanan yang menjadi binaan dari pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan kelasnya.

Tabel 4. Capaian IKU "Tingkat operasional pelabuhan perikanan" Tahun 2020

Sasaran Kegiatan 2				Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan					
WID-2				Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan					
Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			% Realisasi 2019-2020	Rencana DPT 2020	
				Target	Realisasi	% capaian		Target 2020	% Realisasi dari Target Rencana
-	-	-	95,00	75,5	82,99	109,84	-13,48	75,5	109,84

Target indikator ini pada tahun 2020 adalah sebesar 75,5% dengan capaian sebesar 82,99% atau 109,84% terhadap target tahunan. Namun jika dibandingkan capaian tahun 2019 terjadi penurunan sebesar -13,48%. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian target capaian akibat pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 yang terjadi diseluruh dunia. Secara rinci perhitungan capaian tingkat operasional pelabuhan perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Perhitungan Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Tahun 2020

NO	KEGIATAN/KRITERIA	2020		CAPAIAN 2020
		TARGET	REALISASI	
1	Realisasi Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Sumatera	80	84,99	84,99

NO	KEGIATAN/KRITERIA	2020		CAPAIAN 2020
		TARGET	REALISASI	
2	Realisasi Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara	80	85,69	85,69
3	Realisasi Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai	75	71,39	71,39
4	Realisasi Tingkat Operasional Pengkualan Pendaratan Ikan	67	72,67	72,67
5	Realisasi Jumlah pelabuhan perikanan yang diumumkan penetapan kelasnya	8	8	100
Jumlah Realisasi (%)				414,64
Realisasi Capaian Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan				82,928

Pada tahun 2020 realisasi anggaran untuk indikator ini sebesar Rp. 6.581.209.891,- atau 91,52% dari pagu sebesar Rp. 7.191.160.000,-.

A. Tingkat operasional pelabuhan perikanan samudera

Indikator ini menunjukkan persentase capaian pembinaan tingkat operasional di pelabuhan perikanan kelas Pelabuhan Perikanan Samudera (TO) termasuk pelabuhan perikanan yang menjadi tanggung jawabnya, yang dihitung dari pencapaian kegiatan (k) di semua Pelabuhan Perikanan Samudera yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan pelaksanaan keyahbandaran
- b. Penerapan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan
- c. Penyiapan dan pelaksanaan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Pelabuhan Perikanan
- d. Penetapan Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) di Pelabuhan Perikanan
- e. Penilaian Kinerja dan Perhitungan Nilai Ekonomi Menggunakan PIPP di Pelabuhan Perikanan
- f. Pembinaan Pelaksanaan Operasional Lainnya

Indikator ini dihitung dengan cara:

$$TO = \sum_{i=1}^n \frac{1}{b_i} (k_i \times b_i)$$

Keterangan:

- TO = Total persentase pencapaian pembinaan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
- k = jumlah rata-rata pencapaian;
- b = bobot (proporsi alokasi anggaran).

Tingkat pembinaan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) sampai Tahun 2020 mencapai 84,99%. Adapun komponen capaiannya sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 6. Komponen Capaian Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Tahun 2020

Kegiatan/Kriteria	Rata-rata Capaian per Lokasi	Bobot	Nilai Akhir
Pelaksanaan Keyahbandaran	97	0,64	61,68
Pelaksanaan SHTI	92	0,02	1,42

Kegiatan/kriteria	Rata-rata Capaian per Lokasi	Bobot	Nilai Akhir
Pelaksanaan CPB	82	0,04	3,00
Pelaksanaan WKOPP	50	0,07	3,51
Pelaksanaan PFP	92	0,02	1,74
Pelaksanaan Operasional Lainnya	87	0,22	13,64
Total			84,91%

B. Tingkat operasional pelabuhan perikanan nusantara

Indikator ini menunjukkan persentase capaian pembinaan tingkat operasional di pelabuhan perikanan kelas Pelabuhan Perikanan Nusantara (TO) termasuk pelabuhan perikanan yang menjadi tanggung jawabnya, yang dihitung dari pencapaian kegiatan (k) di semua Pelabuhan Perikanan Samudera yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan pelaksanaan kenyahbandaran
- b. Penerapan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan
- c. Penyiapan dan pelaksanaan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPB) di Pelabuhan Perikanan
- d. Penetapan Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) di Pelabuhan Perikanan
- e. Penilaian Kinerja dan Perhitungan Nilai Ekonomi Menggunakan RFP di Pelabuhan Perikanan
- f. Pembinaan Pelaksanaan Operasional Lainnya

Indikator ini dihitung dengan cara:

$$TO = \sum_{i=1}^n (k_i \times b_i)$$

Keterangan:

- TO = Total persentase pencapaian pembinaan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara (FPN);
 k = jumlah rata-rata pencapaian;
 b = bobot (proporsi alokasi anggaran).

Tingkat pembinaan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara (FPN) Tahun 2020 mencapai 85,69%. Adapun komponen capaiannya sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 7. Komponen Capaian Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Tahun 2020

Kegiatan/kriteria	Rata-rata Capaian per Lokasi	Bobot	Nilai Akhir
Pelaksanaan Kenyahbandaran	50	0,01	0,5
Pelaksanaan SHTI	85	0,39	33,5
Pelaksanaan CPB	70	0,10	6,7
Pelaksanaan WKOPP	70	0,02	1,4
Pelaksanaan PFP	80	0,11	8,8
Pelaksanaan Operasional Lainnya	94	0,17	14,8
Total			85,69%

C. Tingkat operasional pelabuhan perikanan pantai

Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) merupakan indikator yang menunjukkan persentase pencapaian pembinaan operasional pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan kelasnya. Indikator ini dihitung dengan cara:

$$TO = \sum_{i=1}^n (k_i \times b_i)$$

Keterangan:

TO = Total persentase pencapaian pembinaan operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP);

k = jumlah rata-rata pencapaian;

b = bobot (proporsi alokasi anggaran).

Tingkat pembinaan operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang telah ditetapkan kelasnya sampai dengan akhir tahun 2020 mencapai 71,29%. Adapun komponen capaiannya sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 8. Komponen Capaian Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Tahun 2020

Kegiatan/Kriteria	Rata-rata Capaian per Lokasi	Bobot	Nilai Akhir
Pelaksanaan CPB	70,83	0,60	42,45
Pelaksanaan WROPP	75,89	0,22	16,75
Pelaksanaan SPDN	68,61	0,11	7,52
Pelaksanaan Kevyahbendaran	67,78	0,02	1,23
Pelaksanaan SHTI	67,46	0,04	2,67
Pelaksanaan Pengusahaan	52,46	0,01	0,66
Total			71,29 %

D. Tingkat operasional pangkalan pendaratan ikan

Tingkat Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan indikator yang menunjukkan persentase pencapaian pembinaan operasional pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan kelasnya. Indikator ini dihitung dengan cara:

$$TO = \sum_{i=1}^n (k_i \times b_i)$$

Keterangan:

TO = Total persentase pencapaian pembinaan operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);

k = jumlah rata-rata pencapaian;

b = bobot (proporsi alokasi anggaran).

Tingkat pembinaan operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sampai dengan akhir tahun 2019 mencapai 72,67%. Adapun komponen capaiannya sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 9. Komponen Capaian Tingkat Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan Tahun 2019

Kegiatan/kriteria	Rata-rata Capaian per Lokasi	Bobot	Nilai Akhir
Pelaksanaan Kesyahbandaran	25	0,02	0,45
Pelaksanaan SHIT	10	0,01	0,15
Pelaksanaan CPB	11	0,01	0,15
Pelaksanaan WROPP	40	0,01	0,59
Pelaksanaan PIP	79	0,90	70,88
Pelaksanaan Operasional Lainnya	10	-	0,00
Total			72,67%

E. Jumlah pelabuhan perikanan yang diusulkan penetapan kelasnya

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah pelabuhan perikanan yang diusulkan untuk ditetapkan kelasnya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Indikator ini dihitung dengan cara menghitung jumlah Pelabuhan Perikanan yang memenuhi kategori usulan yang akan ditetapkan kelasnya.

Adapun kategorinya yaitu:

- Surat Permohonan
- Pernyataan kesiapan operasional
- Identifikasi fasilitas yang harus ada di pelabuhan perikanan
- Laporan operasional pelabuhan perikanan
- Memiliki lembaga pengelola yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi

Jumlah pelabuhan perikanan yang telah diusulkan untuk ditetapkan kelasnya pada tahun 2020 adalah sebanyak 8 pelabuhan. Adapun pelabuhan perikanan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Pelabuhan Perikanan Yang diusulkan untuk penetapan kelasnya Tahun 2020

No	Nama Pelabuhan	Provinsi	Keterangan
1	PP Air Bangin	Sumatera Barat	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/KP/MP/2020
2	PP Sasak	Sumatera Barat	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/KP/MP/2020
3	PP Sikatap	Sumatera Barat	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/KP/MP/2020
4	PP Tikau	Sumatera Barat	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/KP/MP/2020
5	PP Kambang	Sumatera Barat	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/KP/MP/2020
6	PP Sangat	Bali	Memo Dir. PP Nomor 5053/03.TK/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020

No	Nama Pelabuhan	Provinsi	Keterangan
7	PP Tilamuta	Gorontalo	Memo Dir. PP 5053/D3.TK/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020
8	PP Selakau	Kalimantan Barat	Memo Dir.KP.7595/D3.TK/VIII/2020 tanggal 8 Desember 2020



Gambar 4. Pelabuhan Perikanan di Indonesia yang Telah Ditetapkan Kelasnya

2.2.3 Sasaran Strategis (SS-3): Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri

Tingkat Kemandirian SKPT Kab. Merauke

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, yang selanjutnya disebut SKPT, merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir berbasis kawasan. Adapun Tujuan dari SKPT adalah membangun dan mengintegrasikan proses bisnis KP berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya KP di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Lokasi SKPT dan penanggungjawab ditetapkan melalui PermenKP nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang penugasan pelaksanaan pembangunan SKPT di Pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.

Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana di SKPT difokuskan pada pelaksanaan konstruksi dan revitalisasi sarana prasarana utama dan penunjang bisnis kelautan dan perikanan. Sarana prasarana yang dibangun diharapkan mendukung secara menyeluruh proses produksi bisnis kelautan dan perikanan, mulai dari hulu hingga hilir.

Sarana prasarana diarahkan untuk memperkuat aspek penyediaan bahan baku, penanganan dan pengolahan, serta pemasaran. Target indikator kinerja tingkat kemandirian SKPT mengalami peningkatan untuk setiap lokasi. Penilaian SKPT dilakukan berdasarkan kriteria aspek fisik, aspek ekonomi dan produksi, aspek kelembagaan dan aspek social dan lingkungan.

Kabupaten Merauke merupakan salah satu wilayah yang berhadapan langsung dengan WPP 718 Laut Arafura. Pembangunan SKPT Merauke lebih ditekankan pada pemanfaatan sumberdaya perairan di WPP 718 agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan Indonesia Timur khususnya kabupaten merauke yang berada pada wilayah perbatasan dengan negara Papua New Guinea dan Perairan Australia. Potensi Perairan 718 diperkirakan dengan dominasi sumberdaya ikan yang paling tinggi diantara WPP NRI lainnya. Perairan di WPP 718 merupakan salahsatu perairan yang produktif di Indonesia topografi dominan berlumpur dan kaya akan ikan ikan demersal seperti udang, kerapu, kakap merah dan ikan pelagis besar seperti tongkol dan tengiri.

Sebelum pemberlakuan moratorium kapal eks asing termasuk kapal dengan alat penangkapan ikan trawl, Kabupaten Merauke menjadi pelabuhan pangkalan kapal-kapal eks asing (jin pusat yang berpangkalan di Merauke. Lebih lanjut, kondisi merauke sejak dilakukan moratorium kapal ex asing tidak ada aktivitas industri perikanan dan kegiatan bongkar muat hanya kapal skala kecil 1-2 GT milik masyarakat setempat. Pada tahun 2015 KKP menetapkan Kabupaten Merauke sebagai lokasi SKPT yang dikoordinatori Ditjen PDSPIK, kemudian sejak pada tahun 2016 diimpahkan pada Ditjen Perikanan tangkap. Pembangunan SKPT lebih berbasis perikanan tangkap pada pelabuhan perikanan merauke dan aktif dioperasikan pada tahun 2017. Pelabuhan Perikanan Merauke memiliki area 74 Ha, termasuk didalamnya lahan 20 Ha untuk kawasan industri perikanan terpadu yang dapat digunakan oleh pelaku usaha. Lokasi PP Merauke sangat strategis disamping dekat dengan fishing ground juga juga berlokasi di badan sungai besar dengan kedalaman yang dapat menampung kapal berukuran 200 GT sekalipun namun seiring dengan banyaknya kapal yang berpangkalan membutuhkan dermaga bongkar muat yang panjang dari yang dibangun saat ini.

Adapun fasilitas Pelabuhan Perikanan Merauke yang saat ini tersedia antara lain : Dermaga sepanjang 100 m (< 30 GT), Tempat Perbaikan Jaring, Revetment Bronjong, Menara Pengawas, Docking Kapal, Pagar Kawasan, Kantor Keamanan Bersama, Barak Nelayan, SPBN, Es Balok, Cold Storage dan IPAL Kawasan. Sarana Pelabuhan lainnya yaitu : Truck Crane, Truck Box Berinsulasi, Truck Tangki Air, Truck Pemadam Kebakaran dan Forklift. Sejak dioperasikan, pelaku usaha memberikan respon positif untuk melakukan kegiatan pembongkaran ikan. Pada umumnya ikan-ikan tersebut tertangkap oleh alat penangkapan ikan berjenis gillnet oceanic dan alat penangkap ikan ramah lingkungan lainnya.

Dari sisi operasional, capaian volume produksi pada tahun 2018 jumlah ikan yang didaratkan mencapai 13.458 ton dengan nilai produksi sebesar Rp 490,6 miliar. Pada tahun 2019 produksi mencapai 7.529,7 Ton nilai produksi Rp 203,3 miliar. Penurunan ini juga terjadi jika dibandingkan produksi 2018 ke 2019 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pengalihanmuatan ikan antar kapal sehingga kapal yang berangkat dari merauke tidak membawa seluruh hasil tangkapan saat kembali melakukan bongkar muat. Selain itu adanya kebijakan diperbolehkannya SPP kapal dari 1 pelabuhan pangkalan menjadi 2 lokasi pelabuhan pangkalan.



Gambar 5. Grafik volume dan nilai produksi di SKPT Merauke tahun 2018-2020

Lebih lanjut, sampai pada tahun 2020 kinerja produksi mencapai 5.540 ton dengan nilai produksi Rp. 176 Milyar. Produksi 2020 ini lebih rendah dibanding pada tahun sebelumnya yaitu 7.530 Ton. Tren penurunan 2018-2020 disebabkan adanya kebijakan pelabuhan pengkalan boleh 3 lokasi dan dibolehkannya transshipment ikan hasil tangkapan di atas laut menuju pulau jawa sehingga ikan tidak lagi dibongkar seluruhnya di PP Merauke.



Gambar 6. Grafik kunjungan kapal di SKPT Merauke tahun 2018-2020

Pada kegiatan Kunjungan kapal, pada tahun 2018 tercatat 1.164 kunjungan kapal di PP Merauke kemudian menurun pada tahun 2019 mencapai 1.141 kunjungan kapal. Turun kembali di tahun 2020 tercatat 1.110 kunjungan kapal. Penurunan jumlah kapal dari tahun 2018-2020 mempengaruhi jumlah produksi.

Dampak positif dari Pembangunan SKPT Merauke antara lain : (1) meningkatnya volume produksi perikanan tangkap, (2) tumbuhnya kegiatan perikanan tangkap dan multiplier effect kegiatan bisnis lainnya, (3) meningkatnya perekonomian masyarakat merauke, (4) pemanfaatan sumberdaya ikan di WPP 718 yang optimal, (5) ketersediaan suplai bahan baku industri, (7) meningkatnya investasi perikanan di kabupaten merauke, (8) Penyerapan Tenaga Kerja 10.596 nelayan, 50 orang non nelayan (9) meningkatnya kebutuhan logistik perbekalan melaut, meningkatnya permintaan BBM Solar dan (10) meningkatnya pengiriman ikan kontainer berpendingin.

Sebagai pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia timur, PP Merauke juga mempunyai beberapa kendala antara lain :

- Jumlah kontainer berpendingin yang tersedia di Merauke tidak sebanding dengan jumlah muatan ikan beku yang akan didaratkan sehingga kapal menunggu bongkar sampai kontainer datang.

- ketersediaan dermaga untuk kapal kecil belum memadai dan pernah terjadi kapal karam karena terjepit diantara kapal besar.
- Jumlah SDM ASN dan Kontrak sangat minim dibanding dengan jumlah layanan dan beban yang dipikul oleh PP Merauke.
- Tidak ada pembongkaran malam karena SDM pegawai PP Merauke terbatas.
- Belum adanya perbankan di area pelabuhan perikanan.
- Penerbangan dari dan Merauke masih buka tutup sehingga kegiatan investasi, ikan keluar dan pelepasan ikan di TPI tidak optimal
- Pelabuhan Perikanan Merauke belum menjadi Satker UPT yang mandiri dibawah Ditjen Perikanan Tangkap.

Untuk memberikan kenyamanan terhadap pelaku usaha, rencana pembangunan kedepan yang akan dilaksanakan antara lain :

- Bekerjasama dengan pihak swasta untuk membangun area peti kemas kontainer yang menampung ikan beku untuk selanjutnya dibawa ke Jawa dan Sulawesi.
- Menambah kapasitas Cold Storage untuk menampung ikan hasil tangkapan tanpa harus menunggu kontainer berpendingin.
- Bekerjasama dengan Industri perikanan agar membuka unit plant di Merauke yang sudah disediakan lahannya.

Lebih lanjut, terkait capaian tingkat kemandirian SKPT 2020, data hasil kuesioner akan didapatkan pada akhir tahun 2020. Pada tahun 2020 Ditjen perikanan tangkap menargetkan nilai kemandirian SKPT Merauke pada level Pra Mandiri tingkat 4 (tetap).

Data dan informasi yang digunakan untuk penilaian SKPT yang mandiri diperoleh melalui data primer (pengamatan visual, observasi langsung, interview di lokasi SKPT, laporan), data sekunder, dan FGD. Selanjutnya, untuk mengetahui status pengelolaan SKPT yang mandiri, maka disusunlah instrument dan penilaian status SKPT yang mandiri berdasarkan aspek fisik, aspek ekonomi dan produksi, aspek Kelembagaan, aspek sosial dan lingkungan. Tingkat kemandirian SKPT Merauke tahun 2020 pada level Pra Mandiri tingkat 4 dengan grafik poligon sebagai berikut :



Gambar 7. Grafik Hasil Penilaian Tingkat Kemandirian SKPT Merauke

Berdasarkan gambar diatas hasil survei kemandirian SKPT tahun 2020 pada aspek fisik mencapai 0,99. Hal ini dikarenakan sarana fisik yang telah dibangun telah digunakan dengan baik (terdapat aktivitas penggunaan sarana yang disediakan). Untuk aspek produksi dan ekonomi mencapai

0,96. Hal ini didukung dengan meningkatnya skala penggunaan sarana seperti dermaga, ice flake, TPL, Integrated Cold Storage dan adanya ekspor perdana gelembung renang dari SKPT Merauke. Pada aspek kelembagaan mencapai 0,95 dimana kondisi kelembagaan PP Merauke yang merupakan lokasi SKPT Merauke sudah mendapat penetapan kelas pelabuhan perikanan sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara walaupun belum menjadi Satker Mandiri yang telah mempunyai kepala pelabuhan perikanan. Pada aspek sosial dan lingkungan mencapai 0,88. Pelabuhan Perikanan Merauke saat ini telah memberikan dampak dimana sebelum operasional kawasan pelabuhan perikanan adalah tempat yang tidak aman dan terdapat lapangan pekerjaan bagi masyarakat asli Papua. Dari keempat aspek di atas, angka capaian masuk pada skala Pra Mandiri 4 ($\geq 0,75$ dan < 1) atau dapat dikatakan terkelola.

2.2.4 Sasaran Strategis (SS-4) : Tata Kelola Direktorat Pelabuhan Perikanan yang Baik

A. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pelabuhan Perikanan

Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ini adalah Indeks Profesionalitas ASN Ungkup Direktorat Pelabuhan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawainan Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Indeks Profesionalitas ASN meliputi dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Penilaian dimensi kualifikasi menggambarkan informasi kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Sedangkan dimensi kompetensi merupakan informasi yang menggambarkan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, mulai dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/workshop/magang/kursus. Dimensi kinerja menilai kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP). Informasi kepegawainan lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS ditunjukkan melalui dimensi disiplin. Pengolahan data diambil dari database kepegawainan SIMPEG Online KKP.

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja "Indeks Profesionalitas ASN Dit. Pelabuhan Perikanan" Tahun 2020

Sasaran Strategis 4				Tata Kelola Direktorat Pelabuhan Perikanan yang Baik					
SS-4				Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pelabuhan Perikanan					
Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			% Realisasi 2019 - 2020	Rencana DIPP 2020	
				Target	Realisasi	% capaian		Target 2020	% Realisasi the Target Rencana
-	-	-	64,59	72	56,65	78,68	-12,29	72	78,68

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pelabuhan Perikanan tahun 2020 adalah sebesar 56,65 dengan capaian nilai per dimensi yaitu dimensi disiplin (bobot 5) sebesar 4,85, dimensi kinerja (bobot 30) sebesar 25, dimensi kompetensi (bobot 40) sebesar 11,65 dan dimensi kualifikasi (bobot 25) sebesar 15,5. Capaian tahun 2020 masih dibawah target, yaitu sebesar 72 dan juga capaian ini mengalami penurunan pada tahun sebelumnya, terutama dari dimensi kompetensi. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa ASN yang belum mengemukakan data dukung dimensi kompetensi walau sebenarnya telah mengikuti beberapa kegiatan pengembangan kompetensi dan memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan tugas jabatan, mulai dari diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/workshop/kursus.

Selama tahun 2020 beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Melakukan identifikasi bagi pegawai yang membutuhkan pelatihan dan tambahan ketrampilan sesuai dengan deskripsi pekerjaan serta mengemukakan untuk pelatihan dan peningkatan ketrampilan bagi yang bersangkutan.
2. Meningkatkan kompetensi dengan sosialisasi peraturan-peraturan terkait kepegawaian.
3. Pelatihan bagi pegawai dengan fokus pelatihan pada aspek-aspek yang masih rendah bagi pegawai yang bersangkutan.
4. Monitoring dan evaluasi presensi.

Adapun kendala yang dihadapi untuk pencapaian IKU ini salah satunya adalah terkait sisi pemutakhiran database kepegawaian. Dimana masih banyak data yang belum diperbaharui secara berkala oleh pengelola aplikasi kepegawaian Sistem Kepegawaian (SIMPEG) online KKP. Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah dari dimensi kompetensi. Dimana masih banyak pejabat struktural yang belum melaksanakan diklat/pim sesuai levelnya, diklat teknis 20 Jam Pelajaran (JP) dan seminar serta untuk staf pun masih banyak yang belum melaksanakan diklat 20 JP dan mengikuti seminar. Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, beberapa upaya telah dilakukan di antaranya dengan terus melakukan updating secara berkala, koordinasi dan bintek updating data SIMPEG, serta mengembangkan aplikasi SIMPEG secara lebih user friendly. Sedangkan dari dimensi kompetensi, upaya koordinasi telah dilakukan dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP untuk merencanakan pelatihan bagi pegawai KKP, diklat pelatihan dan pendidikan bagian pegawai.

B. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan.

Rekonsiliasi kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dari rekonsiliasi kinerja adalah untuk meningkatkan aspek pelaporan kinerja SAKIP, meningkatkan konsistensi penerapan sistem

manajemen kinerja pada SAKIP dan memberikan umpan balik pada perbaikan proses perencanaan kinerja.

- a. Output yang dinilai dalam rekonsiliasi kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan yaitu
 - Nilai aspek kepastian, kesesuaian, dan ketercapaian masing-masing unit kerja;
 - Eertas kerja hasil rekonsiliasi oleh pembahas dan unit yang direkon, dan;
 - Rekomendasi dari hasil rekon yang akan disampaikan kepada unit kerja untuk ditindaklanjuti.
- b. Dokumen yang dinilai dalam rekonsiliasi kinerja:
 - Perjanjian Kinerja (PK) (Level II-IV)
 - Manual IKU (Level II-IV)
 - Rincian Target IKU (Level II-IV)
 - Rencana Aksi (Renaksi) (Level II)
 - Laporan Kinerja (Lk) Triwulan I, II, dan III
 - Laporan Capaian Kinerja (LCK) Triwulan I, II, dan III (Level III-IV)
 - Dokumen data Dukung Lk/LCK Triwulan I, II, dan III (level II-Level IV)
- c. Nilai diperoleh dari hasil rekonsiliasi kinerja setiap tahunnya, terhadap 5 (lima) komponen SAKIP (kinerja) di Dit. Pelabuhan Perikanan, yaitu:
 - Perencanaan Kinerja;
 - Pengukuran Kinerja;
 - Pelaporan Kinerja;
 - Evaluasi Kinerja, dan;
 - Pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja "Indeks Profesionalitas ASN Inklusif Dit. Pelabuhan Perikanan" Tahun 2020

Tahun keagenan I				Tata Kelola Organisasi Pelabuhan Perikanan yang baik					
IKU-5				Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan					
Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			% Realisasi 2019 - 2020	Resolusi SIPPT 2020	
				Target	Realisasi	% capaian		Target 2020	% Realisasi thd Target Resolusi
-	-	-	-	85	94,16	110,78	-	85	110,78

Pada tingkat eselon II KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan secara internal oleh eselon I. Realisasi indikator ini pada tahun 2020 adalah 94,16 atau sebesar 110,78% dari target sebesar 85%. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

C. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Direktorat Pelabuhan Perikanan yang Dokumen Tindaklanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pelabuhan Perikanan berdasarkan LHP yang terbit pada Triwulan 4 Tahun 2019 s.d. Triwulan 3 Tahun 2020 yang

dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Pelabuhan Perikanan yang menjadi objek pengawasan.

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja "Persentase jumlah hasil pengawasan Direktorat Pelabuhan Perikanan yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan" Tahun 2020

Sumber Kegiatan 1				Tata Kelola Direktorat Pelabuhan Perikanan yang baik					
IKU-4				Persentase jumlah hasil pengawasan Direktorat Pelabuhan Perikanan yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan					
Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			% Kemajuan 2019 - 2020	Rencana DIPT 2020	
				Target	Realisasi	% capaian		Target 2020	% Realisasi thd Target Rencana
-	-	-	-	100	100	100	-	100	100

Realisasi indikator ini pada tahun 2020 adalah 100 atau sebesar 100% dari target sebesar 100%. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

D. Persentase Direktorat Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan indikator ini berasal dari rata-rata persentase unit kerja level 2-4 yang tergabung dan mendistribusikan informasi dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih (aplikasi Bitrix24).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IKU dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data.

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja "Persentase Direktorat Pelabuhan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar" Tahun 2020

Sumber Kegiatan 1				Tata Kelola Direktorat Pelabuhan Perikanan yang baik	
IKU-4				Persentase Direktorat Pelabuhan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar	
				Tahun 2020	Rencana DIPT 2020

Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target	Realisasi	% capaian	% Realisasi 2019 - 2020	Target 2020	% Realisasi (tdl Target Rencana
-	-	-	81,01	82	100	121,95	23,43	100	121,95

Sampai dengan akhir tahun 2020, realisasi IKU ini sebesar 100 persen atau telah mencapai 121,95% melebihi target tahun 2020 sebesar 82 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian saat ini tercatat naik sebesar 23,43%. Hal ini menunjukkan semakin tingginya pemanfaatan teknologi informasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk sharing informasi dan pengetahuan dan seluruh pejabat Direktorat Pelabuhan Perikanan di level 3 dan 4 serta staf telah tergabung dalam aplikasi Bitrix dan aktif dalam sharing informasi. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar mencakup tiga komponen yaitu :

1. Keputahan dalam menyampaikan dokumen (Renstra, Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Laporan Kinerja, dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi)
2. Kelikutsertaan : pimpinan unit kerja dimulai dari level II sampai dengan staf pelaksana (minimal 2 orang staf pelaksana per level IV)
3. Keaktifan : pimpinan unit kerja dimulai dari level II sampai dengan level IV sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Nilai IKPA Direktorat Pelabuhan Perikanan

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L.

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja "Nilai IKPA Direktorat Pelabuhan Perikanan" Tahun 2020

Tercapainya Indikator Kinerja "Nilai IKPA Direktorat Pelabuhan Perikanan" yang Terukur									
IKU-4				Nilai IKPA Direktorat Pelabuhan Perikanan					
Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Tahun 2020			% Realisasi 2019 - 2020	Revisi DIPT 2020	
				Target	Realisasi	% capaian		Target 2020	% Realisasi (tdl Target Rencana
-	-	-	85,18	88	75,78	86,11	-11,40	88	75,78

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Pelabuhan Perikanan sampai dengan akhir tahun 2020 adalah 75,78 atau hanya mencapai 86,11% dari target tahun 2020 sebesar 88%. Hal ini disebabkan oleh realisasi anggaran yang masih rendah serta adanya deviasi halaman III DIPA dan penyesuaian target capaian akibat pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 yang terjadi diseluruh dunia. Oleh sebab itu evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran satker



Direktorat Pelabuhan Perikanan perlu dilakukan peningkatan sepanjang tahun periode anggaran berjalan. Orientasi pencapaian IKU ini tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian output anggaran melalui : (i) Kelancaran pelaksanaan anggaran (pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM); (ii) Mendukung manajemen kas (pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D); dan (iii) Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKOL/LKPP) (penyampaian LP) Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja).

Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan ditahun yang akan datang adalah dengan meningkatkan ketertiban dan konsisten dalam penggunaan dan pengajuan pembayaran sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Upaya tersebut dapat mengubah pola pencairan anggaran sehingga lebih merata di tiap triwulannya dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun dapat berkurang. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas, tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif, dan efisien dengan capaian output yang benar-benar optimal.

2.3 Kinerja Anggaran

Berdasarkan penetapan awal pagu Alokasi anggaran Direktorat Pelabuhan Perikanan tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 54.087.783.000,- kemudian pada triwulan 2 mengalami pengalihan alokasi anggaran sebesar 65,88% ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Penanggulangan Covid-19 sehingga alokasi anggaran Direktorat Pelabuhan Perikanan berkurang menjadi Rp. 18.451.572.000,-. Selanjutnya pada triwulan 3 Direktorat Pelabuhan Perikanan mendapatkan tambahan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan ekonomi nasional (PEN) dampak covid-19 sebesar Rp. 12.500.000.000,- sehingga alokasi anggaran bertambah menjadi Rp.30.951.572.000,-. Namun mengingat waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan PEN yang relatif singkat serta adanya pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran covid-19 maka untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan PEN, selanjutnya pada triwulan 4 dilakukan penyesuaian terhadap pagu anggaran dengan pengalihan sebagian dana penanganan ekonomi nasional dampak Covid-19 sebesar Rp.6.580.800.000 (21,58%) ke Direktorat lain sehingga pagu anggaran satker Direktorat Pelabuhan Perikanan menjadi Rp. 24.270.772.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 18.802.047.720,- (77,47%). Secara rinci realisasi anggaran berdasarkan pengelompokan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 16. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	
	(Rp)	(Rp)	%
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	24.270.772.000	18.802.047.720	77,47
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang ditingkatkan fasilitasnya	1.477.058.000	1.083.523.640	88,68
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang meningkat operasionalnya	1.598.500.000	1.883.408.059	89,32
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang ditingkatkan fasilitasnya	5.776.600.000	5.423.682.700	93,89

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	
	(Rp)	(Rp)	%
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang meningkat operasionalnya	1.467.805.000	1.345.005.035	92,95
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang ditingkatkan fasilitasnya	1.188.015.000	1.143.016.586	96,21
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang meningkat operasionalnya	2.028.910.000	1.804.750.041	89,95
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang ditingkatkan fasilitasnya	996.036.000	974.159.666	97,80
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang meningkat operasionalnya	1.293.644.000	1.244.097.386	96,22
Pelabuhan Perikanan yang diuruskan penetapan kelainya	312.701.000	303.340.370	97,03
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Merauke yang mandiri	1.441.780.000	1.384.585.637	96,03
SPON yang ditingkat operasionalnya	3.960.000.000	-	-
Layanan Perkantoran	240.120.000	211.870.000	88,24

Tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai realisasi anggaran Direktorat Pelabuhan Perikanan sampai dengan akhir Tahun 2020 sebesar 77,47%. Hal ini disebabkan karena penyesuaian target capaian akibat pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia dan kegiatan lebih fokus dalam tahap koordinasi sebagai dampak diberlakukannya Work From Home (WFH) yang menyebabkan beberapa kegiatan yang bersifat tatap muka secara langsung seperti pertemuan dan supervisi sebagian besar tidak dapat dilaksanakan.

BAB 4. PENUTUP

Direktorat Pelabuhan Perikanan merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pelabuhan Perikanan berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra DIPP, dan perjanjian kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Direktur Pelabuhan Perikanan.

Laporan Kinerja (LK) Direktorat Pelabuhan Perikanan Tahun 2020 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) selama tahun 2020. Terhadap capaian IKU dan IK tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU dan IK tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.

Beberapa IKU yang belum memenuhi target pada tahun 2020, lebih disebabkan karena penyesuaian target capaian akibat pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 yang terjadi diseluruh dunia. Oleh karena itu, pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi fokus utama dalam melaksanakan kegiatan pada tahun berikutnya.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan Tahun 2020 ini disebabkan oleh kegiatan-kegiatan prioritas Direktorat Pelabuhan Perikanan lebih fokus dalam tahap koordinasi sebagai dampak diberlakukannya *Work From Home* (WFH), sehingga beberapa kegiatan dalam pertemuan langsung dibunda atau dibatalkan.

Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan, informasi capaian dan permasalahan yang diuraikan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun selanjutnya. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Melakukan evaluasi terhadap capaian IKU Direktorat Pelabuhan Perikanan tahun 2020 terutama pada kegiatan yang realisasi capaiannya belum memenuhi target.
2. Menyusun rencana operasional kegiatan dan target capaian IKU baik secara triwulan, semester ataupun tahunan disertai langkah-langkah strategis untuk pencapaiannya dengan tetap memperhatikan kondisi pandemi covid-19 dan anggaran yang ada.
3. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang bersifat pembangunan infrastruktur;
4. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana operasional kegiatan yang sudah ditetapkan.
5. Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan Tahun 2020 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Direktur Pelabuhan Perikanan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.